



RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas berkenaan -Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terutama Pasal 78, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah mencakup Renja masing-masing Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RKPD provinsi yang mana merupakan penjabaran setiap tahun dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah dimulai sejak minggu pertama bulan Januari Tahun 2025.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mana RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 merupakan bagian satuan tahunan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 terdiri dari Bab Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup. Melalui dokumen Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan; yang terdiri dari target kinerja dan aspek pendanaan dalam rangka pencapaian target dimaksud; dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan nantinya, serta memberikan “umpan balik” bagi penyusunan Renja berikutnya.

Demikian RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Palangka Raya, 20 Juli 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah



SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196902121989112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	84
4.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja dan Pembangunan PD	84
4.2 Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	85
BAB V PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2024	15
2.2	Pencapaian Kinerja Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	19
2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	25
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Anggaran Tahun 2026	49
3.1	Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	61
4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	66
4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026	68



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
- a. Biro Administrasi Pimpinan;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Biro Perekonomian;
 - f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Biro Administrasi Pembangunan;
 - h. Biro Organisasi; dan
 - i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (provinsi) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2026 yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah penjabaran dari Rancangan Awal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 serta berdasarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Perubahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102)
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120).
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31)
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan Kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam penyusunan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2026;
- b. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- c. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor Kelautan dan Perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

B.1. Evaluasi Program Tahun 2024

Evaluasi Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dilakukan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan program yang dilaksanakan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi sebesar Rp. 99.320.058.745,00 yang terdiri dari: belanja Operasional sebesar Rp. 75.231.746.150,00 dan belanja modal sebesar Rp. 24.088.312.595,00 untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Berkenaan dengan pergeseran dan perubahan anggaran pada APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/029/TAPD/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 hal Pagu Indikatif Belanja Hasil Kesepakatan Bersama KUPA dan PPAS-P APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp. 99.320.058.745,00 meningkat Rp. 28.636.750.860,00 menjadi Rp. 127.956.809.605,00 , realisasi keuangan sebesar Rp. 104.762.929.298,- (81,87 %)., sedangkan capaian kinerja fisik sebesar 96,27 %. Secara rinci jumlah alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 seperti terlihat pada tabel berikut :

Jumlah Anggaran dan Realisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	CAPAIAN AKHIR TAHUN		
				KEUANGAN		FISIK
				RP	%	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.784.487.559	29.913.174.531	23,38	27.100.448.128	90,60	95,47
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2.565.666.080	2.565.666.080	2,01	2.348.841.368	91,55	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	30.502.576.471	31.151.459.888	24,35	30.495.956.433	97,90	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	41.077.951.192	61.787.811.663	48,29	42.655.949.012	55,78	77,35
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.248.222.322	1.248.222.322	0,98	1.195.385.400	95,77	100,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.290.475.121	1.290.475.121	1,01	966.348.957	74,88	81,90
TOTAL	104.469.378.745	127.956.809.605	100,00	104.762.929.298	81,87	90,00

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	144.272,92	137.867,02*	95,56	Baik
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	141.244,64	164.099,54*	116,18	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)	74.200	75.862*	102,24	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	35.385,52	35.693,87*	100,87	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	559,43	59,84*	100,69	Sangat Baik
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,40	3,30*	97,06	Baik
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	110,75	96,51	87,14	Baik
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	5	8	160,00	Sangat Baik
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	93,62	110,14	Sangat Baik
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	52	56	107,69	Sangat Baik
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB	111,50	Sangat Baik
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	35	127	362,86	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka sementara yang diolah berdasarkan data dari kabupaten/kota (belum melakukan Validasi Tahun 2024).

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan kriteria : (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya, (ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat, (iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program SKPD, (iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja SKPD, dan (v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan peran SKPD dalam pembangunan daerah. Hasil indentifikasi permasalahan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah ke depan dijabarkan sebagai berikut:

A. Bidang Perikanan Tangkap

- Usaha Perikanan tangkap didominasi perahu tanpa motor dan Boat bermotor ≤ 5 GT yang menangkap disekitar perairan payau dan laut ≤ 4 Mil (Motorisasi).
- Masih kurangnya sarana dan prasarana Perikanan tangkap.
- Minimnya sarana dan prasarana Perikanan di sentra nelayan.
- Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup khususnya ekosistem terumbu karang dan ikan.
- Padatnya penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah perairan WPP 712 dan rendahnya tingkat kemampuan Kompetitif nelayan setempat masih terjadi konflik sosial diantara nelayan tradisional dan modren.
- Perlunya penataan kelembagaan dan peningkatkan kualitas kemitraan pada kelompok nelayan.

B. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya air tawar dan air payau.
- Kurangnya dukungan permodalan dari perbankan
- Kurangnya tenaga penyuluh Perikanan mengingat tenaga penyuluh yang tersedia pada tingkat kabupaten dan belum sampai per kecamatan.
- Usaha Perikanan budidaya masih mempunyai kendala, kualitas benih dan harga pakan yang tinggi.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap pembudidaya ikan
- Belum adanya zonasi budidaya ikan tawar, payau dan laut
- Adanya penyakit musiman dalam kegiatan budidaya ikan
- Belum optimalnya keahlian yang dimiliki oleh pembudidaya air laut dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam usaha budidaya.
- Jumlah produksi ikan air tawar belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada
- Banyaknya usaha budidaya yang tidak memiliki izin usaha dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menyulitkan dalam hal pengendalian dan pengaturan
- Kurangnya sarana dan prasarana peningkatan daya saing produk perikanan
- Masih sedikit kelompok yang produknya bersertifikasi
- Minimnya produk Pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu
- Kurangnya Pelaku usaha pengolahan yang berkompeten

- Pemasaran yang relatif belum lancar.
- Kurangnya bahan baku dan industri pengolahan lainnya.
- Terbatasnya kemampuan akses informasi teknologi pengolahan.
- Belum termotivasinya nelayan dalam melakukan pengembangan produk hasil perikanan.

C. Bidang Kelautan dan Pesisir

- Kurangnya Kawasan konservasi yang ditetapkan KKP dan belum tersedia RPZ Kawasan Konservasi
- Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola dan pemanfaatan Kawasan laut dan pesisir
- Kurangnya animo pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang laut dan pesisir

D. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Kurangnya SDM Pengawasan : PPNS, Pengawas Perikanan dan Polsus
- Sistem Integrasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum Optimal

B.2. Perkiraan Pencapaian Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Total Belanja sebesar Rp. 51.204.063.944,00 dimana terjadi penurunan sebesar (59,98 %) bila dibandingkan dengan anggaran Belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 76.752.745.661,00. Dari total anggaran tahun 2024 tersebut terurai dalam 6 program, diharapkan keberhasilan kinerja dapat mencapai 100 % dengan target per triwulan sebagai berikut:

Target Realisasi Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)			
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.069.273.000	213.854.600	534.636.500	908.882.050	1.069.273.000
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	67.157.500	13.431.500	33.578.750	57.083.875	67.157.500
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	430.000.000	86.000.000	215.000.000	365.500.000	430.000.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.443.734.500	488.746.900	1.221.867.250	2.077.174.325	2.443.734.500
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	190.725.000	38.145.000	95.362.500	162.116.250	190.725.000
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125.000.000	25.000.000	62.500.000	106.250.000	125.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65.810.000	13.162.000	32.905.000	55.938.500	65.810.000
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6.718.995.200	1.343.799.040	3.359.497.600	5.711.145.920	6.718.995.200
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	10.000.000	25.000.000	42.500.000	50.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.502.721.600	300.544.320	751.360.800	1.277.313.360	1.502.721.600
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.715.000.000	543.000.000	1.357.500.000	2.307.750.000	2.715.000.000
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.240.834.000	248.166.800	620.417.000	1.054.708.900	1.240.834.000
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	617.080.000	123.416.000	308.540.000	524.518.000	617.080.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	736.940.000	147.388.000	368.470.000	626.399.000	736.940.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.866.800.000	373.360.000	933.400.000	1.586.780.000	1.866.800.000

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)			
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
	Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.072.244.394	3.814.448.879	9.536.122.197	16.211.407.735	19.072.244.394
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	243.500.000	48.700.000	121.750.000	206.975.000	243.500.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.075.000	116.215.000	290.537.500	493.913.750	581.075.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.453.817.743	890.763.549	2.226.908.872	3.785.745.082	4.453.817.743
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.007.500.000	201.500.000	503.750.000	856.375.000	1.007.500.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.574.700.000	514.940.000	1.287.350.000	2.188.495.000	2.574.700.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.431.156.007	686.231.201	1.715.578.004	2.916.482.606	3.431.156.007
TOTAL PAGU ANGGARAN			51.204.063.944	10.240.812.789	25.602.031.972	43.523.454.352	51.204.063.944

Untuk mencapai target tersebut, maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi, dengan tujuan:

- Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:

- Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan:

- Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

Sedangkan Program teknis strategis yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA HASIL	TARGET		CAPAIAN		PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	CAPAIAN KEUANGAN PER TRIWULAN											
				VOLUME OUTPUT	SATUAN	VOLUME OUTPUT	SATUAN			REALISASI TRI. I		FISIK	REALISASI TRI. II		FISIK	REALISASI TRI. III		FISIK	REALISASI TRI. IV.		FISIK
										KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	B	Predikat	BB	Predikat	27.784.487.559	29.913.174.531	2.943.086.318	9,84	28,64	9.211.717.332	30,79	57,28	17.470.584.223	58,40	81,15	27.100.448.128	90,60	95,47
			Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPIID	33	Naskah	121	Naskah														
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	- Peningkatan manajemen dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (mangrove), dan terumbu karang - Penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran Dinas dalam konservasi keanekaragaman hayati laut	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	4,00	Lokasi	4,00	Lokasi	2.565.666.080	2.565.666.080	66.516.858	2,59	30,00	713.306.696	27,80	60,00	1.589.060.152	61,94	85,00	2.348.841.368	91,55	100,00
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap - Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan - Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif d optimalnya - Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPP)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	137130,72	Ton/Tahun	160127,81	Ton/Tahun	30.502.576.471	31.151.459.888	395.963.615	1,27	30,00	4.065.936.868	13,05	60,00	5.779.892.939	18,55	85,00	30.495.956.433	97,90	100,00

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA HASIL	TARGET		CAPAIAN		PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	CAPAIAN KEUANGAN PER TRIWULAN											
				VOLUME OUTPUT	SATUAN	VOLUME OUTPUT	SATUAN			REALISASI TRI. I		FISIK	REALISASI TRI. II		FISIK	REALISASI TRI. III		FISIK	REALISASI TRI. IV.		FISIK
										KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Pendapatan Nelayan	- Manajemen usaha penangkapan ikan melalui pendekatan supply (Sumber Daya Ikan) dan demand (Hasil Penangkapan Ikan)		Nilai Tukar Nelayan	109,50	NTN/NTBi	109,90	NTN/NTBi														
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, dan laut - Pembinaan kelembagaan pelaku usaha - pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi dan instalasi - Pembinaan kelompok pembudidaya ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	136140,63	Ton/Tahun	136164,09	Ton/Tahun	41.077.951.192	61.787.811.663	1.597.740.670	2,59	23,21	11.871.764.915	19,21	46,41	15.122.939.711	24,48	65,75	42.655.949.012	69,04	77,35
Meningkatnya Kebutuhan Benih	- Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan) - Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat		Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)	74200,00	Ribu Ekor	74200,00	Ribu Ekor														
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku [%]	85,00	%	85,00	%	1.248.222.322	1.248.222.322	73.738.194	5,91	30,00	566.309.194	45,37	60,00	835.874.509	66,97	85,00	1.195.385.400	95,77	100,00
Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP	- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok)	48,00	Kelompok	204,00	Kelompok														

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA HASIL	TARGET		CAPAIAN		PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	CAPAIAN KEUANGAN PER TRIWULAN											
				VOLUME OUTPUT	SATUAN	VOLUME OUTPUT	SATUAN			REALISASI TRI. I		FISIK	REALISASI TRI. II		FISIK	REALISASI TRI. III		FISIK	REALISASI TRI. IV.		FISIK
										KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	- Peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan - Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste - Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35073,68	Ton/Tahun	35528,94	Ton/Tahun	1.290.475.121	1.290.475.121	21.240.000	1,65	24,57	67.190.000	5,21	49,14	352.928.344	27,35	69,62	966.348.957	74,88	81,90
Meningkatnya Konsumsi Ikan	- Promosi peningkatan konsumsi ikan		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	57,62	Kg/Kap/Tahun	58,67	Kg/Kap/Tahun														
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan		Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,30	%	2,80	%														
TOTAL PAGU								5.098.285.655	9,84	27,00	26.496.225.005	20,71	54,00	41.151.279.878	32,16	76,50	104.762.929.298	81,87	90,00	5.098.285.655	9,84

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada indikator kinerja utama serta analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta analisis Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra untuk Tahun 2023, antara lain:

- 1) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
- 2) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
- 3) Meningkatnya Kebutuhan Benih
- 4) Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan
- 5) Meningkatnya Konsumsi Ikan
- 6) Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
- 7) Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
- 8) Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku
- 9) Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP
- 10) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel
- 11) Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun suatu Rancangan Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 seperti dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target Kinerja dan Realisasi					2026	PD Penanggung Jawab	
						2025							Target
						Target 2025	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV			
1	2	3				4	5					9	10
III. Urusan Pilihan													
1 Kelautan dan Perikanan													
1.1	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.867,05	129.685,25	136.164,09	137.867,02*	152.405,21	15.240,52	35.053,20			160.537,50	Dislutkan	
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	130.526,10	159.610,81	160.127,81	164.099,54*	145.481,98	14.548,20	33.460,86			149.486,44	Dislutkan	
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63	56,00	58,67	75.862*	61,23					63,04	Dislutkan	
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ribu ekor)	67.630	70.517	72.824	35.693,87*	76.390	17.569,70	53.473			78.580	Dislutkan	
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107	108	109,90	59,84*	112	11,20	25,76			113,25	Dislutkan	
1.6	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,4	4,6	2,80	3,30*	3,50	0,18	0,81			3,60	Dislutkan	
1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	85	85	96,51	90	85	85			90	Dislutkan	
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	85	202	56	56	58	8,00	13,00			60	Dislutkan	
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	4	8	6	3,00	3,00			7	Dislutkan	
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35.214	35.214	35.528,94	35.693,87*	35.697,36	8.210,39	16.063,81			36.009,20	Dislutkan	
1.11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	B	B	BB	BB	B					B	Dislutkan	
1.12	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	40	43	46	127	37	3	9			40	Dislutkan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis sektor kelautan dan perikanan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya. Upaya mengoptimalkan produksi dari segi perikanan budidaya berupa peningkatan ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang ada di Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat. Kemudian dari sektor perikanan tangkap, upaya peningkatan produksi hasil dan kualitas tangkapan nelayan dilakukan dengan peningkatan armada perikanan baik sarana maupun prasarana perikanan tangkap.

Faktor menghambat peningkatan optimalisasi produksi perikanan kualitas sumberdaya pembudidaya/nelayan sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi samping itu juga ketersediaan sarana dan prasarana seperti pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana budidaya ikan, dan pengolahan ikan.

2. Daya saing produk yang masih rendah

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diantaranya : (a) Isu ketahanan pangan, (b) Perubahan iklim dunia, (c) Peluang pemanfaatan inovasi Blue Economy, (d) Kualitas dan realibilitas data perikanan, (e), Minat mitra kerjasama untuk pembangunan hilirisasi perikanan, (f) Tantangan perdagangan perikanan global, (g) Sertifikasi dan standard yang ditetapkan oleh mitra, (h) Harga komoditas pangan dan non pangan, (i) Ancaman stunting Indonesia, (j) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (k) Perkembangan teknologi.

Di samping hal tersebut di atas, dari segi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro dan kecil di Kalimantan Tengah diantaranya: (1) pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu yang masih rendah, (2) penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, (3) belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, (4) permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar,

serta perizinan, (5) pembinaan usaha yang perlu ditingkatkan, (6) keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD).

3. Masih rendahnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;

Salah satu indikator tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah dalam ukuran PDRB perkapita yang menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata yang mungkin dicapai masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan peranan dan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB maupun PDRB perkapita terus dilakukan diantaranya melalui optimalisasi penggunaan SDA yang dimiliki. Penggunaan SDA harus diprioritaskan pada sektor antara lain komoditas yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Meningkatkan PDRB berkorelasi dengan peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan melalui melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah.

4. Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Pembangunan daerah tidak terlepas dari memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam dalam pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Semakin menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan juga seringkali memicu konflik antar nelayan. Konflik nelayan ini timbul disinyalir karena beberapa hal misalnya, adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan, pelanggaran jalur penangkapan, penjarahan rumpon, penggunaan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, minimnya hasil tangkapan di daerah tertentu (*over exploited*) dan menyebabkan nelayan mencari daerah tangkapan baru. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum serta pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Perikanan kepada nelayan/pelaku usaha di bidang perikanan.

Isu penting berkenaan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Disamping itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi perairan yang memiliki fungsi agar terjaga kelestarian sumberdaya ikan dan menunjang program pariwisata bahari.

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum;

Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan tangkap yang sangat luas, tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan yang kuat.

Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk terjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Kapasitas kelembagaan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap juga belum kuat, tegas, dan **independent** (mandiri), karena keputusannya seringkali masih dipengaruhi oleh oknum-oknum penguasa. Hal ini terjadi, karena Pemerintah belum memberikan dukungan penuh kepada lembaga penegakan hukum tersebut, sehingga oknum-oknum penguasa masih bisa dapat mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya.

6. Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan publik yang cepat dan tepat

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat menjadi isu yang tertuang di RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan peningkatan kinerja pelayanan publik bidang kelautan dan Perikanan.

Melalui penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terkait dengan adanya Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang berhubungan dengan analisis kebutuhan ada beberapa hal yang turut mempengaruhi Rancangan Awal RKPD antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan

Dari telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tantangannya adalah:

- a) Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan;
- b) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penunjang UPTD Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat;
- f) Terwujudnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian;
- g) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
- h) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a) Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- b) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang budidaya (laut, payau dan tawar) masih cukup luas;
- c) Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk kelautan dan perikanan kondusif;
- d) Kebutuhan produk kelautan dan perikanan di masyarakat cukup tinggi;
- e) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Secara detail, rincian penjelasan di atas pada komposisi penganggaran masing-masing program dan kegiatan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

**Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026
Terhadap Renstra**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN			
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)					
	Dinas Kelautan dan Perikanan				41.218.309.935,00	110.718.309.935,00	69.500.000.000,00				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				41.018.309.935,00	110.518.309.935,00	69.500.000.000,00				
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			41.018.309.935,00	110.518.309.935,00	69.500.000.000,00				
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		25.681.635.782,00	25.681.635.782,00	-			
				Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID	37						
3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	1.230.716.030,00	1.230.716.030,00	-	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	265.716.030,00	265.716.030,00	-
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	63.700.000,00	63.700.000,00	-

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN
									AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)		
3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3	25	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	317.000.000,00	317.000.000,00	-	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	526.300.000,00	526.300.000,00	-	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	13.617.526.816,00	13.617.526.816,00	-	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 orang	12.621.886.816,00	12.621.886.816,00	-	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun layanan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun layanan	905.400.000,00	905.400.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	30.240.000,00	30.240.000,00	-	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Kegiatan	252.500.000,00	252.500.000,00	-	
3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	144.500.000,00	144.500.000,00	-	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Kegiatan	604.075.000,00	604.075.000,00	-	
3	25	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	143.000.000,00	143.000.000,00	-	
3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	37.075.000,00	37.075.000,00	-	
3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
3	25	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.357.307.600,00	1.357.307.600,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.707.600,00	22.707.600,00	-	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	-	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	-	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	67.600.000,00	67.600.000,00	-	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	247.500.000,00	247.500.000,00	-	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	240.000.000,00	240.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	3.374.700.000,00	3.374.700.000,00	-	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	-	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	
3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	-	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	-	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4.997.310.336,00	4.997.310.336,00	-	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Kendaraan	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	-	
3	25	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Mebel	19.985.336,00	19.985.336,00	-	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Peralatan	17.325.000,00	17.325.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)		6	1.877.209.023,00	4.877.209.023,00	3.000.000.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Dokumen Program Strategis Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Program Strategis Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	7 Kegiatan	930.000.000,00	3.430.000.000,00	2.500.000.000,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Wilayah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Lokasi	100.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan ekosistem di lahan mangrove • Integrasi aplikasi Geoportals "Laut Berkah" dengan Satelit KKP. • Kapal pengawasan

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN
									AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)		
3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Tersusnya Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Jumlah Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	5 Dokumen	130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.000.000.000,00	Pencadangan kawasan konservasi di kawasan WPP-712 (7 Kabupaten pesisir Kalimantan Tengah): <ul style="list-style-type: none"> • Lamun • Terumbu karang • Mangrove • Zona inti pemijahan ikan • Wilayah Kuala Jelai Kec. Jelai Kabupaten Sukamara (KKP3K-01) 137,503 Ha; • Wilayah Sungai pasir Kec. Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KKP3K-02) 567,75 Ha; • Wilayah Sabuai Kec.Arut Selatan - Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat (KKP3K-03) 465,73 Ha; • Wilayah Sungai Bangamat - Tanjung Siamuk Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan (KKP3K-04)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)		
								1.583,073 Ha; • Wilayah Sungai Bakau Kec. Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan (KKP3K- 05) 1.465,559 Ha; • Wilayah Ujung Pandaran Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur (KKP3K- 06) 1.641,09 Ha; • Wilayah Tanjung Cemeti, Katingan Kuala - Kab. Katingan (KKP3K-07) 3.033,796 Ha; • Wilayah Cemara Labat Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas (KKP3K- 10) 1.335,731 Ha

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	02	1.01	0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Jumlah dokumen Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	2 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Tersedianya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	2 Materi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan yang mendukung Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2 Kegiatan	320.000.000,00	320.000.000,00	-	
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Terkelolanya Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 kegiatan	320.000.000,00	320.000.000,00	-	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kegiatan	627.209.023,00	1.127.209.023,00	500.000.000,00	
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Masyarakat	377.209.023,00	877.209.023,00	500.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Naskah akademis/policy brief penanganan sampah di laut • Fasilitasi pemberdayaan

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
								Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan sampah pesisir • Gerakan bersih pantai				
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 kelompok	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	02	1.03	0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	2 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)		145.481,98	6.737.934.905,00	66.737.934.905,00	60.000.000.000,00	
						Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)		112				
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan yang mendukung Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	1.499.283.970,00	31.499.283.970,00	30.000.000.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 data	310.000.000,00	310.000.000,00	-	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Prasarana	439.283.970,00	439.283.970,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN
									AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)		
3	25	03	1.01	0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	3 prasarana	200.000.000,00	30.200.000.000,00	30.000.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kampung Nelayan Modern • Smart Fisheries Village (penyuluhan dan pelatihan masyarakat) • Bioflok di kampung nelayan • Wisata bahari dikampung nelayan • Sanitasi • Bedah Rumah • Kapal perikanan dan alat tangkap • IT
3	25	03	1.01	0006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Dokumen data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	3 data	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.01	0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	3 sarana	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	03	1.01	0008	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	Jumlah kegiatan Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	3 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Sarana	150.000.000,00	150.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	03	1.02									
3	25	03	1.02									
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	3 Data	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Sarana	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kegiatan yang mendukung Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3 Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan yang mendukung Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Terfasilitasinya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	3 bukti	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Lokasi	4.088.650.935,00	34.088.650.935,00	30.000.000.000,00	
3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan	Jumlah paket Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan	3 paket	2.277.525.935,00	32.277.525.935,00	30.000.000.000,00	Modernisasi pelabuhan perikanan : • Studi Kelayakan dan Penyusunan DED • Sarpras Pelabuhan
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Sarana	911.125.000,00	911.125.000,00	-	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Pemerintahan	900.000.000,00	900.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Terlaksananya kegiatan dalam rangka penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.08	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah kegiatan dalam rangka Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan dalam rangka Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah kegiatan dalam rangka Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan dalam Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
3	25	03	1.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya kegiatan dalam Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah kegiatan dalam Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	3 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Terlaksananya kegiatan dalam Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah kegiatan dalam Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)		152.405,21	4.358.341.000,00	10.858.341.000,00	6.500.000.000,00	
						Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)		76.390				

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	04	1.01									
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah kegiatan dalam rangka Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	4 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Lokasi	2.050.000.000,00	8.050.000.000,00	6.000.000.000,00	
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Prasarana	500.000.000,00	500.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN
									AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)		
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Sarana	600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.000.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perikanan budi daya berorientasi ekspor dengan komoditas udang melalui modelling budidaya berbasis kawasan • Mobil berefrigrasi • Pembangunan pabrik es, • Bantuan Unit pengolah ikan • Mengembangkan Broodstock Center • Eksavator • Sarana air bersih • Tangki BBM • Pembangunan tambahan 1 cluster • Mobil Operasional pickup
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya yang dibina	4 Pembudidaya	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Kampung Perikanan Budi Daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
								menjaga dari kepunahan				
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan dalam rangka Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perikanan budi daya berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan udang dan kepiting, melalui modelling budidaya berbasis kawasan dan revitalisasi budidaya
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	4 kegiatan	2.208.341.000,00	2.708.341.000,00	500.000.000,00	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perikanan budi daya berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan patin melalui modelling budidaya berbasis

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
								kawasan dan revitalisasi budidaya				
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	708.341.000,00	708.341.000,00	-	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)		90	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00	-	
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok)		58				
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Lokasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	7 Lokasi	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00	-	
3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Terlaksananya penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah kegiatan Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	1 kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah kegiatan Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	1 kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	196.000.000,00	196.000.000,00	-	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terawasinya usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	1 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbinanya Pokmaswas	Jumlah Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)		35.697,36	1.117.189.225,00	1.117.189.225,00	-	
						Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)		61,23				
						Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)		3,5				

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	06	1.02									
3	25	06	1.02									
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 Unit	117.189.225,00	117.189.225,00	-	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	-	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	PAGU INDIKATIF		BERTAMBAH/ BERKURANG/ TETAP	KETERANGAN				
					AWAL (RENSTRA) (RP.)	USULAN KEBUTUHAN (RP.)						
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan yang mendukung Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Kegiatan	750.000.000,00	750.000.000,00	-	
3	25	06	1.03	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitas bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	6 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
3	25	06	1.03	0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Tersedianya dan tersalurnya bahan baku	Jumlah paket bahan baku yang tersalurkan	12 paket	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
3					NON URUSAN				200.000.000,00	200.000.000,00	-	
3	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				200.000.000,00	200.000.000,00	-	
3	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1 Tahun Layanan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
3	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				200.000.000,00	200.000.000,00	-	
3	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
					TOTAL				41.218.309.935,00	110.718.309.935,00	69.500.000.000,00	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada RKPD Tahun Anggaran 2025 seperti pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Tahun Anggaran 2026

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
131	886858	21-03-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Perlu bantuan kolam iksn biofloc untuk masyarakat	Pembuang Hulu Kecamatan Hanau, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail	4	Buah	30000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
136	886948	21-03-2024	H. ACHMAD RASYID	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Perlu bantuan pengadaan kolam dan keramba untuk masyarakat pembudidaya ikan	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail	20	paket	20000000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
150	895634	23-03-2024	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Kecamatan Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail	1	kegiatan	15000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
227	928255	01-04-2024	JAINUDIN KARIM, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Patin, Gurami, Bawal, Pakan, obat-obatan untuk Kelompok Perikanan Pokdakan Bawi Jawehan dan Pokdakan Geronggang Batuah Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec.	Kelompok Perikanan Pokdakan Bawi Jawehan dan Pokdakan Geronggang Batuah Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec.	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	PAKET	40000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
					Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim Rp 200,000,000	MB Ketapang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah											
234	930647	01-04-2024	SENGKON, SE	Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhan	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG MANYANGEN RP.200.000.000	Desa Tawang Manyangen, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	-	-	1	paket	-	-
235	930657	01-04-2024	SENGKON, SE	Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhan	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA GERAGU, TUMBANG TUNGKU, KATINGAN RP.220.000.000	Desa Geragu Tumbang Tungku Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	-	-	1	paket	-	-
236	930662	01-04-2024	SENGKON, SE	Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhan	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG GERAGU-TEWANG PAJARI, KATINGAN RP.220.000.000	Desa Tawang Derayu-Tewang Pajari, Kab Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	-	-	1	paket	-	-
290	933602	02-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	masyarakat kesulitan untuk sarpras perikanan bioflok	serruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	15000000	Penyediaan Prasarana Pmbudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
291	933603	02-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor	mesin ces 6,5 HP membantu mobilitas ,masyarakat perairan	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan	1	paket	40000000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				perikanan									dengan ketersediaan dana				
351	934181	03-04-2024	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Pengadaan mesin Kelotok cis Kelompok tani Desa Marawan Lama Rp300.000.000	Kelompok tani Desa Marawan Lama, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	50000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
355	934460	03-04-2024	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Patin Dan Pakan Untuk Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Rp.200.000.000	Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	20000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
443	935985	03-04-2024	BRYAN ISKANDAR, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Alat Tangkap Ikan KUB Nelayan Mandiri, Kab Kotawaringin Barat Rp 100.000.000	KUB Nelayan Mandiri, Kab Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	50000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
451	936000	03-04-2024	BRYAN ISKANDAR, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	BANTUAN PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN JARING MILINIUM KUB "KAPITAN MAKMUR" JL.SWADAYA RT.01 DS. SEI KAPITAN KEC.KUMAI Rp 25.000.000	JL.SWADAYA RT.01 DS. SEI KAPITAN KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
497	938625	04-04-2024	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Pengadaan Bibit Ikan	Desa Parenggean, Kec. Parenggean, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	100000	Ekor	10000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
548	939189	05-04-	Drs.	Belum	BANTUAN ALAT	KUB	Provinsi	Dinas	Usulan	disetujui	Lengkapi data	Disesuaikan	Usulan diakomodir, data	1	PAKET	50000000	Penyediaan

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		2024	YOHANES F. ERING, M.Si	optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	TANGKAP IKAN BERUPA JARING ANGKAT, JARING INSANG, MES CES 13HP, UNTUK KUB HAPAKAT ATEI, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	HAPAKAT ATEI, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah		Kelautan dan Perikanan	disetujui		dukung	dengan ketersediaan anggaran	dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana				Sarana Usaha Perikanan Tangkap
567	939255	05-04-2024	H. JUBAIR ARIFIN	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	bantuan untuk kelompok usaha bersama nelayan BERKAT USAHA	Kelurahan kumai hulu kec kumai, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	20000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
573	939276	05-04-2024	H. JUBAIR ARIFIN	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	bantuan mesin diesel 23 PK untuk KUB CAHAYA NURANI desa teluk bogam	desa teluk bogam, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	25000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
577	939294	05-04-2024	H. JUBAIR ARIFIN	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	bantuan mesin perahu nelayan Dong Feng 23 PK untuk KUB KUBU LESTARI	desa kubu kecamatan kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	30000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
579	939306	05-04-2024	H. JUBAIR ARIFIN	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	bantuan untuk kelompok usaha bersama nelayan BINTANG JAYA kel kumai hulu	kel kumai hulu kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	15000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
580	939313	05-04-2024	H. JUBAIR ARIFIN	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	bantuan bantuan jaring rajungan untuk KUB NELAYAN PANTAI SEJAHTERA desa teluk bogam	desa teluk bogam , kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	15000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
585	939350	05-04-	H. JUBAIR	Belum	bantuan mesin	desa sungai	Provinsi	Dinas	Usulan	disetujui	Lengkapi data	Disesuaikan	Usulan diakomodir, data	1	paket	30000000	Penyediaan

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		2024	ARIFIN	optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	diesel 23 PK untuk KUB UMBANG LESTARI 02 desa sungai bakau	bakau, kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah		Kelautan dan Perikanan	disetujui		dukung	dengan ketersediaan anggaran	dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana				Sarana Usaha Perikanan Tangkap
605	939556	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN BIBIT IKAN PATIN, NILA, BAWAL, GURAMI DAN PAKAN UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
606	939591	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN REMPA KENTONG 2,5 INCHI	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	15000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
620	939723	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN MESIN POMPA SEDOT AIR PERIKANAN	KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
621	939732	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN GILL NET 2-3 INCHI PERIKANAN MEREK ARIDA	KELOMPOK PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
622	939736	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN NET MILENIUM 4 INCHI PERIKANAN	KELOMPOK PETANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
623	939746	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan	JARING IKAN 2,5 INCHI MEREK ARIDA	KELOMPOK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan	1	PAKET	25000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				sektor perikanan									dengan ketersediaan dana				
625	939793	05-04-2024	SUWARNO, SE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	MESIN MEREK LONCHIN 10 HP REDAKSI	NELAYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	40000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
646	940206	05-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA DAN PAKAN UNTUK SERUYAN	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20000000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
658	940248	05-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN KAB SERUYAN RP.200.000.000	PETANI IKAN DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	30000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
659	940250	05-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN UNTUK KAB KOTIM RP.200.000.000	PETANI IKAN DI KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	30000000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
660	940252	05-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN MESIN CES 6,5 HI UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000	NELAYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	40000000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
661	940256	05-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA DAN PAKAN UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000	PETANI IKAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
667	940275	05-04-2024	FERRY KHAIDIR	Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana	Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Menyampaikan Permohonan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di wilayah desa tersebut berupa semenisasi	Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	disetujui	Lengkapi data dukung	-	-	1500	M	-	-
702	940640	05-04-2024	H. SUDARSONO	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN KAB SERUYAN RP.400.000.000	KELOMPOK TANI IKAN DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	30000000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dunia dihadapkan pada tantangan fundamental dalam pemenuhan kebutuhan pangan seiring proyeksi peningkatan populasi global yang diperkirakan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Proyeksi ini mengimplikasikan lonjakan kebutuhan protein dunia hingga 70%. Keterbatasan daya dukung lahan dan sistem produksi pangan berbasis darat menempatkan sektor kelautan dan perikanan, atau yang dikenal sebagai blue food pada posisi yang sangat strategis. Blue food tidak hanya menawarkan solusi ketahanan pangan, tetapi juga keunggulan nutrisi yang superior. Komoditas seperti udang dan ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan sumber protein terestrial lainnya, dengan kandungan protein masing-masing mencapai 0,25 gram dan 0,22 gram per gram bobot. Lebih dari itu, pangan biru memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi krisis iklim global.

Menjawab tantangan dan peluang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan visi jangka panjang "Indonesia Emas 2045" dengan menempatkan Ekonomi Biru sebagai salah satu pilar utamanya. Kebijakan Ekonomi Biru ini diimplementasikan melalui strategi "Triple Win" yang menyeimbangkan tiga pilar fundamental: kesehatan ekologi laut (Ocean Health), pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan (Ocean Wealth), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara merata (Ocean Prosperity). Pendekatan ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus berjalan seiring dengan upaya konservasi dan pemerataan, bukan sekadar eksploitasi.

secara inheren merupakan instrumen untuk menerjemahkan dan melaksanakan agenda prioritas nasional yang tertuang dalam 8 Misi Asta Cita. Terdapat tiga misi yang relevansinya sangat tinggi dengan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

1. **Misi Kedua:** "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru". Misi ini secara eksplisit menempatkan pengembangan

ekonomi biru sebagai fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional.

2. **Misi Kelima:** "Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri". Misi ini menjadi landasan bagi program-program strategis seperti pengembangan *Shrimp Estate* dan akselerasi pemasaran produk berorientasi ekspor, yang bertujuan mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
3. **Misi Kedelapan:** "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur". Misi ini selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan Ekonomi Biru, yang menuntut pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pada tingkat provinsi, arah pembangunan dipandu oleh Visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju 2025-2029 : "Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045."

Visi ini dijiwai oleh spirit kearifan lokal *Manggatang Utus*, yang bermakna mengangkat harkat dan martabat manusia Dayak khususnya, dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu wahana utama untuk mewujudkan spirit *Manggatang Utus* dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat, terutama yang hidup di wilayah pesisir dan sepanjang daerah aliran sungai.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan kerangka strategis "**Program Huma Betang**". Program ini merupakan adaptasi lokal dari filosofi Ekonomi Biru nasional, yang menerjemahkan konsep abstrak ke dalam tindakan konkret yang relevan secara budaya dan kontekstual. Program ini bertumpu pada dua pilar utama:

1. **Betang Maju:** Pilar ini berfokus pada akselerasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah. Program prioritasnya meliputi Optimalisasi Pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Pengembangan *Shrimp Estate* Udang Vaname di Sukamara, Akselerasi Pemasaran Produk orientasi ekspor, dan Fasilitasi Perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pilar ini secara langsung menargetkan penyelesaian masalah infrastruktur, industrialisasi, dan akses pasar.
2. **Betang Makmur:** Pilar ini berfokus pada jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program prioritasnya mencakup Fasilitasi/Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan, penyediaan Asuransi bagi Nelayan, Dukungan Pengendalian Inflasi, serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berbasis kearifan lokal. Pilar ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial pelaku usaha perikanan.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 adalah:

“Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan dan Berkualitas dengan indikator outcome:”

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

2. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

Perencanaan ini merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kerangka rujukan nasional, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik geografis perairan darat dan pesisir yang khas.

Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Fondasi dan Penguatan Dasar	Implementasi dan Perluasan Program Prioritas	Integrasi Teknologi dan Peningkatan Produktivitas	Konsolidasi dan Ekspansi	Evaluasi, Inovasi Lanjutan, dan Keberlanjutan

Penjelasan

a. Tahap I – Tahun 2025: Fondasi dan Penguatan Dasar

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penguatan fondasi program dengan memastikan ketersediaan data dasar kelautan dan perikanan yang akurat, termasuk peta zonasi kawasan konservasi, potensi sumber daya ikan, dan kondisi ekosistem perairan. Dinas akan melakukan inventarisasi dan verifikasi data berbasis survei lapangan serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Selain itu, tahun ini akan menjadi momentum untuk memulai program pelatihan teknis bagi nelayan dan pembudidaya secara pilot project di beberapa lokasi strategis. Penguatan kelembagaan internal dilakukan melalui penataan SOP, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan sistem manajemen berbasis data.

b. Tahap II – Tahun 2026: Implementasi dan Perluasan Program Prioritas

Memasuki tahun kedua, penekanan diarahkan pada implementasi luas program prioritas, seperti rehabilitasi habitat penting (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) di kawasan prioritas, serta pelaksanaan pengelolaan perikanan berbasis kuota dan zonasi. Program pelatihan teknis mulai diperluas ke seluruh kabupaten/kota pesisir dengan melibatkan mitra akademik dan lembaga pelatihan. Infrastruktur pendukung seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, dan instalasi budidaya air payau mulai dibangun atau direvitalisasi. Di tahap ini, monitoring populasi ikan dan kualitas lingkungan perairan mulai dilakukan secara periodik, dengan laporan tahunan yang transparan dan terpublikasi.

c. Tahap III – Tahun 2027: Integrasi Teknologi dan Peningkatan Produktivitas

Tahun ketiga menjadi titik penting dalam integrasi teknologi informasi dan inovasi untuk sektor kelautan dan perikanan. Sistem pemantauan berbasis satelit dan IoT untuk kegiatan penangkapan ikan serta pemantauan kualitas air di tambak dan keramba mulai diterapkan secara penuh. Pendampingan intensif kepada kelompok nelayan dan pembudidaya dilakukan untuk mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan efisien energi. Pada tahap ini, fokus juga diberikan pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan standar mutu, sertifikasi produk, dan pengembangan rantai nilai (value chain) agar produk memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.

d. Tahap IV – Tahun 2028: Konsolidasi dan Ekspansi Pasar

Tahap keempat ditandai dengan konsolidasi seluruh capaian sebelumnya dan memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah di pasar. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan memperluas kerja sama strategis dengan dunia usaha, lembaga riset, dan pemerintah daerah lain. Strategi hilirisasi mulai diintensifkan, seperti pengolahan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. Akses pasar diperluas melalui promosi, pameran, dan penguatan jejaring pemasaran berbasis digital. Pada tahap ini, kinerja pengelolaan kawasan konservasi dievaluasi secara komprehensif, termasuk tingkat keberhasilan rehabilitasi habitat dan peningkatan stok ikan.

e. Tahap V – Tahun 2029: Evaluasi, Inovasi Lanjutan, dan Keberlanjutan

Tahun terakhir merupakan tahap evaluasi menyeluruh terhadap seluruh strategi dan capaian lima tahun, dengan mengukur keberhasilan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan untuk melihat tingkat keberlanjutan program, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kontribusi terhadap kelestarian ekosistem perairan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perumusan inovasi lanjutan dan pembaruan strategi untuk periode berikutnya, termasuk kemungkinan perluasan program ke wilayah yang belum tercakup. Keberhasilan jangka panjang akan diukur dari kemampuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan secara konsisten.

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan										
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	96,52	102	102	102	103	103	103	
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	98,22	102	102	102	103	103	103	
3.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	59,84	34.24	34.75	35.27	35.80	36.34	36.88	
4.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	2	2	2	2	2	2	2	
5.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	97,06	85	85	85	85	85	85	
6.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	164099.54	169022.53	174093.2	179316	184695.48	190236.34	195943.40	
7.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	137867.02	142003.03	146263.12	150651.02	155170.55	159825.66	164620.40	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam RJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 telah disusun Program Prioritas Daerah, termasuk mandat Kegiatan Prioritas Utama, di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2029 yaitu : “MENGANGKAT HARKAT MARTABAT MASYARAKAT DAYAK KHUSUSNYA, UMUMNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (MANGGATANG UTUS), DENGAN SPIRIT KEARIFAN LOKAL DAN BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG BERKAH, KALTENG MAJU, KALTENG BERMARTABAT UNTUK MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045. Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
1.	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan	Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi	- Meningkatnya produksi perikanan tangkap - Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Asuransi Petani dan Nelayan 2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap
2.		Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru	Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	- Meningkatnya produksi perikanan tangkap - Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Asuransi Petani dan Nelayan 2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap
3.	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan	Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif,	Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau	Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Masyarakat	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
	masyarakat sebagai keadilan sosial	mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah	bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan		

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan kerangka strategis "**Program Huma Betang**". Program ini merupakan adaptasi lokal dari filosofi Ekonomi Biru nasional, yang menerjemahkan konsep abstrak ke dalam tindakan konkret yang relevan secara budaya dan kontekstual. Program ini bertumpu pada dua pilar utama:

1. **Betang Maju:** Pilar ini berfokus pada akselerasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah. Program prioritasnya meliputi Optimalisasi Pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Pengembangan *Shrimp Estate* Udang Vaname di Sukamara, Akselerasi Pemasaran Produk orientasi ekspor, dan Fasilitasi Perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pilar ini secara langsung menargetkan penyelesaian masalah infrastruktur, industrialisasi, dan akses pasar.
2. **Betang Makmur:** Pilar ini berfokus pada jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program prioritasnya mencakup Fasilitasi/Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan, penyediaan Asuransi bagi Nelayan, Dukungan Pengendalian Inflasi, serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berbasis kearifan lokal. Pilar ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial pelaku usaha perikanan.

4.2. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan operasional yang memastikan setiap program dan kegiatan berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Penyusunan ini juga memperhatikan keterpaduan antara tugas dan fungsi dinas dengan visi-misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya

menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Kebijakan strategis pertama difokuskan pada penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat alur informasi, meningkatkan keakuratan data, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan sistem tata kelola yang modern, diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Arah kebijakan kedua adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar dan teknologi terkini. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui pelatihan teknis, pendampingan usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi nelayan. Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi kelautan dan perikanan daerah.

Kebijakan ketiga menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan ini diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya, termasuk penerapan zonasi pemanfaatan laut dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan. Langkah ini akan memastikan bahwa potensi sumber daya tetap tersedia untuk generasi mendatang tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi saat ini.

Arah kebijakan keempat difokuskan pada pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang berbasis inovasi dan nilai tambah. Penguatan rantai nilai (value chain) melalui industri pengolahan akan meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan ini mencakup dukungan terhadap inovasi produk, pengembangan pasar, serta sertifikasi mutu untuk memastikan standar kualitas terpenuhi dan mampu bersaing di tingkat global.

Kebijakan kelima diarahkan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun dengan pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan lembaga internasional. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya, mempercepat transfer teknologi, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan sinergi yang kuat, tantangan seperti keterbatasan anggaran atau hambatan teknis dapat diatasi secara lebih efektif.

Arah kebijakan berikutnya adalah memperkuat sistem perlindungan ekosistem pesisir dan laut melalui program rehabilitasi, restorasi, dan perlindungan habitat penting. Upaya ini meliputi rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang tidak hanya berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Kebijakan lain yang menjadi prioritas adalah mendorong digitalisasi sektor kelautan dan perikanan. Transformasi digital ini mencakup penerapan e-logbook perikanan, sistem monitoring kapal, serta platform pemasaran daring untuk produk perikanan. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperluas akses pasar, dan mempercepat alur distribusi produk dari produsen ke konsumen.

Arah kebijakan juga menekankan pentingnya pendidikan dan literasi kelautan di masyarakat. Edukasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut, mengelola sumber daya secara bijak, dan memahami regulasi yang berlaku. Pendidikan kelautan dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, program penyuluhan, dan kampanye publik yang berkelanjutan.

Kebijakan strategis turut mengarahkan perhatian pada peningkatan kualitas riset dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan. Riset ini mencakup aspek teknologi budidaya, pengolahan, konservasi, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Hasil riset diharapkan menjadi dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi lokal.

Arah kebijakan selanjutnya adalah penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan yang efektif akan mengurangi praktik-praktik ilegal seperti illegal fishing, destructive fishing, dan pencemaran laut. Dinas akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan memanfaatkan teknologi pemantauan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir terhadap risiko bencana dan fluktuasi harga pasar. Upaya ini dapat dilakukan melalui diversifikasi usaha, penguatan akses permodalan, dan pengembangan asuransi perikanan. Dengan ketahanan ekonomi yang kuat, masyarakat pesisir akan lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian.

Kebijakan juga mencakup pengembangan kawasan minapolitan dan sentra produksi perikanan terpadu. Pengembangan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pusat produksi perikanan yang kompetitif.

Arah kebijakan terakhir menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring yang terstruktur terhadap seluruh program dan kegiatan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memastikan bahwa pelaksanaan rencana strategis berjalan sesuai target, mampu mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.

Dengan arah dan kebijakan yang terencana, terukur, dan berbasis data ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Periode 2025–2029 menjadi momentum strategis untuk melakukan lompatan kemajuan melalui kolaborasi, inovasi, dan pengelolaan sumber daya secara bijak.

Tabel 4.1 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sesuai prinsip konservasi dan pemanfaatan berwawasan lingkungan.	Mendorong pertumbuhan ekonomi biru berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Penguatan tata kelola perikanan tangkap, budidaya, dan konservasi wilayah pesisir.	Selaras dengan kebijakan nasional dan target SDGs 14 (Ekosistem Laut).
2.	Peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan.	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing masyarakat pesisir.	Program pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi akses permodalan.	Fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
3.	Pengembangan infrastruktur pendukung kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan, cold storage, dan sarana distribusi.	Peningkatan infrastruktur ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal.	Pembangunan dan modernisasi sarana-prasarana perikanan tangkap dan budidaya.	Mendukung konektivitas hasil perikanan ke pasar.

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing).	Memperkuat penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.	Operasi pengawasan rutin dan pemanfaatan teknologi pemantauan kapal.	Menekan kerugian negara dan menjaga kelestarian stok ikan.
5.	Diversifikasi produk hasil perikanan dan penguatan industri pengolahan untuk nilai tambah.	Mendorong hilirisasi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.	Fasilitasi inovasi teknologi pengolahan dan promosi produk.	Memperluas pasar domestik dan ekspor.

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Dinas Kelautan dan Perikanan						53.190.661.780,60					136.019.525.935,00	
	3....	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						53.190.661.780,60					135.769.525.935,00	
	3.25...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						53.190.661.780,60					135.769.525.935,00	
1	3.25.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	25.681.635.782,00				100 %	29.042.000.000,00	
2	3.25.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.230.716.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	7 Dokumen	1.455.000.000,00	
3	3.25.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	265.716.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan	2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
4	3.25.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	63.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	2 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	3.25.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
6	3.25.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
7	3.25.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											secara berkelanjutan,			
8	3.25.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	317.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	4 Laporan	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
9	3.25.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	526.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Laporan	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
10	3.25.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah tahun layanan administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13.617.526.816,00			Mewujudkan pertanian,	1 Tahun	14.070.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Daerah	perangkat daerah								perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
11	3.25.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	12.621.886.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	88 Orang/Bulan	13.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12	3.25.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	905.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang	1 Dokumen	950.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
13	3.25.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	3.25.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
15	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
16	3.25.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	252.500.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara	4 Kegiatan	635.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											berkelanjutan,			
17	3.25.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
18	3.25.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
19	3.25.01.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan pertanian, perkebunan,	2 Laporan	35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			PERIKANAN
20	3.25.01.1.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	144.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	0 Laporan	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
21	3.25.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket layanan kepegawaian perangkat daerah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	604.075.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi	2 Paket	635.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
22	3.25.01.1.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Unit	85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
23	3.25.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	143.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri	1 Paket	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
24	3.25.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
25	3.25.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											n,			
26	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	10 Orang	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
27	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	10 Orang	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
28	3.25.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.357.307.600,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan,	-	1.535.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
29	3.25.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.707.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
30	3.25.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
31	3.25.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Paket	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
32	3.25.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan	1 Paket	850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
33	3.25.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
34	3.25.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
35	3.25.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	67.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Laporan	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
36	3.25.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
37	3.25.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	-	-	-	247.500.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,	-	310.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Daerah									kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
38	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
39	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk	4 Unit	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
40	3.25.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	3.374.700.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	3.857.000.000,00	
41	3.25.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											pangan secara berkelanjuta n,			
42	3.25.01.1.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembang an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjuta n,	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA N
43	3.25.01.1.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembang an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjuta n,	1 Laporan	850.000.000,00	DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA N
44	3.25.01.1.08.0	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Semua	PENDAPAT	Mewujudkan	1 Laporan		DINAS

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
	004	Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1.368.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	AN ASLI DAERAH (PAD)	pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		1.500.000.000,00	KELAUTAN DAN PERIKANAN
45	3.25.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	4.997.310.336,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	6.545.000.000,00	
46	3.25.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan	10 Unit	2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Jabatan									yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
47	3.25.01.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	19.985.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	4 Unit	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
48	3.25.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	17.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan	10 Unit	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
49	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	6 Unit	4.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
50	3.25.02..	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	4.877.209.023,00				6 Lokasi	5.420.000.000,00	
51	3.25.02.1.01.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah lokasi dalam rangka pengelolaan ruang laut Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	3.430.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan	6 Lokasi	3.840.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
52	3.25.02.1.01.002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2,5 Ha	2,5 Ha	2,5 Ha	2,5 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	2,5 Ha	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
53	3.25.02.1.01.003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan	0 Ha	700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											secara berkelanjutan,			
54	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	100 Orang	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
55	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	2.140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
56	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA TRANSFER	Mewujudkan pertanian,	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			N DAN PERIKANAN
57	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
58	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
59	3.25.02.1.02.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	320.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan 1 Kegiatan	380.000.000,00	
60	3.25.02.1.02.007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan	2 Dokumen	380.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
61	3.25.02.1.03.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.127.209.023,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	1.200.000.000,00	
62	3.25.02.1.03.001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	877.209.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara	100 Orang	900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											berkelanjutan,			
63	3.25.02.1.03.004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kelompok	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
64	3.25.02.1.03.006	Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	5 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
65	3.25.03..	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Produksi perikanan tangkap	112 NTN/NTBi 145.481,98	112 NTN/NTBi 145.481,98	112 NTN/NTBi 145.481,98	112 NTN/NTBi 145.481,98	66.737.934.905,00				112 NTN/NTBi 145.481,98	66.957.525.935,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
			(Ton/tahun)	Ton	Ton	Ton	Ton					Ton		
66	3.25.03.1.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	31.499.283.970,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	2 Kegiatan	31.630.000.000,00	
67	3.25.03.1.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	380.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
68	3.25.03.1.01.002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	439.283.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan,	3 Unit	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
									n, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			N
69	3.25.03.1.01.005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	30.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	7 Unit	30.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
70	3.25.03.1.01.006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
71	3.25.03.1.01.0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	5 Unit	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
72	3.25.03.1.01.0008	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	Jumlah Surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon yang diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan	5 Rekomendasi	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
73	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	7 Unit	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
74	3.25.03.1.02.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	300.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
75	3.25.03.1.02.001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
76	3.25.03.1.02.004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	7 Unit	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
77	3.25.03.1.03.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai	Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap 10-30 GT yang menjadi kewenangan provinsi	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	250.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,	1 Kegiatan 1 Kegiatan	250.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
78	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	3 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
79	3.25.03.1.05.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pendaftaran armada perikanan dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk	1 Kegiatan	100.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
80	3.25.03.1.05.003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
81	3.25.03.1.06.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola dan dibangun	7 Pelabuhan	7 Pelabuhan	7 Pelabuhan	7 Pelabuhan	34.088.650.935,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan	7 Pelabuhan	34.127.525.935,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											pangan secara berkelanjutan,			
82	3.25.03.1.06.001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	32.277.525.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Pelabuhan Perikanan	33.277.525.935,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
83	3.25.03.1.06.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	911.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Unit	450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
84	3.25.03.1.06.0	Pelaksanaan Fungsi	Fungsi Pemerintahan dan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Semua	DANA	Mewujudkan	1 Layanan		DINAS

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
	003	Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana					900.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		400.000.000,00	KELAUTAN DAN PERIKANAN
85	3.25.03.1.07.	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	100.000.000,00	
86	3.25.03.1.07.003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan	4 Rekomendasi	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
87	3.25.03.1.08.	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	100.000.000,00	
88	3.25.03.1.08.003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan	3 Rekomendasi	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
89	3.25.03.1.09.	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	100.000.000,00	
90	3.25.03.1.09.003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan	5 Rekomendasi	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											secara berkelanjutan,			
91	3.25.03.1.10.	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	250.000.000,00	
92	3.25.03.1.10.001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	3 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
93	3.25.03.1.10.003	Penerbitan surat rekomendasi Buku	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang	5 Rekomenda	5 Rekomenda	5 Rekomenda	5 Rekomenda	100.000.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA TRANSFER	Mewujudkan pertanian,	5 Rekomenda	100.000.000,00	DINAS KELAUTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkan	si	si	si	si		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	si		N DAN PERIKANAN
94	3.25.04..	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) Jumlah kebutuhan benih (ekor)	152.405.21 Ton 76.390 Ekor	152.405.21 Ton 76.390 Ekor	152.405.21 Ton 76.390 Ekor	152.405.21 Ton 76.390 Ekor	10.858.341.000,00				152.405.21 Ton 76.390 Ekor	12.000.000.000,00	
95	3.25.04.1.01.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	100.000.000,00	
96	3.25.04.1.01.003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA TRANSFER UMUM-	Mewujudkan pertanian, perkebunan,	6 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Pembudidayaan Ikan	Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko						Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			PERIKANAN
97	3.25.04.1.05.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kegiatan pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Payau dan Tawar	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	8.050.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	5 Kegiatan	9.100.000.000,00	
98	3.25.04.1.05.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi	3 Unit	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
99	3.25.04.1.05.004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Unit	5.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
100	3.25.04.1.05.007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri	30 Orang	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
101	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
102	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan	1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											n,			
10 3	3.25.04.1.06.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-	-	-	-	2.708.341.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembang an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjuta n,	-	2.800.000.000,00	
10 4	3.25.04.1.06.0 003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembang an agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjuta n,	1 Unit	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA N
10 5	3.25.04.1.06.0 004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	708.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	DANA TRANSFER UMUM- DANA	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan,	1 Unit	800.000.000,00	DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Kabupaten/Kota							n, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			N
106	3.25.05..	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	58 Kelompok 90 %	58 Kelompok 90 %	58 Kelompok 90 %	58 Kelompok 90 %	1.246.000.000,00				58 Kelompok 90 %	1.350.000.000,00	
107	3.25.05.1.01.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.246.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara	3 Kegiatan	1.350.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											berkelanjutan,			
108	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	4 Perkara	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
109	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	5 Perkara	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
110	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA TRANSFER UMUM-	Mewujudkan pertanian, perkebunan,	4 Orang	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Perikanan yang dibentuk						Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			PERIKANAN
111	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	196.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	0 Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
112	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi	1 Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
113	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	5 Pelaku Usaha	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
114	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri	1 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
115	3.25.06..	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun	3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun	3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun	3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun	1.117.189.225,00				3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun	21.000.000.000,00	
116	3.25.06.1.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	367.189.225,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Kegiatan	20.200.000.000,00	
117	3.25.06.1.02.003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Meningkatkan Produk	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Meningkatkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	117.189.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk	1 Kegiatan	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
		yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Berdaya Saing								pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,			
118	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	0 Kegiatan	20.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
119	3.25.06.1.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	750.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan	1 Kegiatan	800.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											pangan secara berkelanjutan,			
120	3.25.06.1.03.001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
121	3.25.06.1.03.002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Unit Usaha	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12	3.25.06.1.03.0	Penyediaan dan	Jumlah peningkatan	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton		Semua	DANA	Mewujudkan	20 Ton		DINAS

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
2	004	Penyaluran Bahan Baku	ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan					300.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		300.000.000,00	KELAUTAN DAN PERIKANAN
123	X....	NON URUSAN						200.000.000,00					250.000.000,00	
124	X.XX...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						200.000.000,00					250.000.000,00	
125	X.XX.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	200.000.000,00				-	250.000.000,00	
126	X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	200.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan	-	250.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
											secara berkelanjutan,			
127	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H							53.190.661.780,60					136.019.525.935,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini merupakan usulan Rencana Operasional Fasilitasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 , dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Renja Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Kelautan dan Perikanan yang bersumber anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyusunan rancangan renja telah mengakomodir aspirasi stake holder Kelautan dan Perikanan dan usulan kegiatan dari Unit Pelaksana Teknis yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan se Kalimantan Tengah. Aspirasi stake holder dan usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya Renja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka penetapan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan maupun dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.